



**LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PERIODE BULAN AGUSTUS 2025**

PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA MENUJU WBBM
TARAKAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	1
C. Tujuan Kegiatan.....	1
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Penyelenggara Survei.....	2
BAB II DESAIN KUESIONER DAN METODOLOGI SURVEI.....	3
A. Rancangan Desain Kuesioner	3
B. Responden Survei	4
C. Pengumpulan Data	6
D. Metode Pencacahan	6
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis	6
1. Metode Pengolahan Data.....	6
2. Metode Analisis.....	6
F. Rekomendasi Survei	6
BAB III HASIL SURVEI	7
A. Profil Responden.....	7
1. Jenis Kelamin Responden.....	7
2. Kelompok Usia Responden	7
3. Tingkat Pendidikan Responden.....	7
4. Pekerjaan Responden	8
5. Jenis Layanan yang Diterima Responden.....	8
B. Hasil Survei.....	8
1. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	8
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	9
3. Masukan Reponden	9
BAB IV EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	11
A. Evaluasi atas Hasil Survei.....	15
B. Tindak Lanjut atas Hasil Survei.....	15
BAB V PENUTUP.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Responden Menurut Jenis Kelamin	7
Tabel 3.2	Responden Menurut Usia	7
Tabel 3.3	Responden Menurut Pendidikan Terakhir	7
Tabel 3.4	Responden Menurut Pekerjaan	8
Tabel 3.5	Responden Menurut Jenis Layanan yang Diterima	8
Tabel 3.6	Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	8
Tabel 3.7	Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	9
Tabel 3.8	Masukan Survei	9
Tabel 3.9	Jawaban Survei Kelayakan	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Responden Survei	14
Lampiran 2	Tangkapan Layar Tampilan Survei	14
Lampiran 3	Tangkapan Layar Pengiriman Survei kepada Responden	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain besar reformasi birokrasi yang digagas pemerintah sejak tahun 2010 menargetkan bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik merupakan bukti hadirnya pemerintah di masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik hendaknya menyelenggarakan pelayanan prima. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu ukuran kualitas pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bukti bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintah mengingat semakin hari, masyarakat semakin kritis dan mempunyai tuntutan tinggi atas kualitas pelayanan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga negara merupakan lembaga penyelenggara layanan publik. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dan anti korupsi sekaligus adaptif atas perubahan. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Hasil survei SPKP dan SPAK nantinya akan diolah dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). SPKP dan SPAK diselenggarakan secara rutin setiap bulan, guna memantau perkembangan kualitas layanan publik yang diselenggarakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan persepsi penerima layanan.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan SPKP dan SPAK BPK diselenggarakan berdasarkan :

1. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; dan
2. Peraturan Menteri PAN dan RB (Peraturan Menteri PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025; dan
4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/K/I-XIII.2/1/2024 tentang Kerangka Kerja Manajemen Integritas pada Badan Pemeriksa Keuangan.

C. Tujuan Kegiatan

SPKP dan SPAK BPK dilakukan dengan tujuan:

1. menjaring masukan pengguna layanan dan sebagai sarana evaluasi kinerja pelayanan publik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
2. meningkatkan kualitas layanan publik yang prima serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
3. memenuhi ketentuan Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup

SPKP dan SPAK periode bulan Agustus 2025 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan kepada seluruh pengguna layanan publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang telah menerima pelayanan sampai dengan bulan Agustus 2025.

E. Penyelenggara Survei

Seiring beralihnya peran penyelenggara SPKP dan SPAK sepenuhnya ke bawah kendali BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, maka tanggung jawab atas keseluruhan proses survei, mulai dari perancangan instrumen, pelaksanaan pengumpulan data, hingga analisis statistik berada pada satuan kerja tanpa keterlibatan langsung dari Inspektorat Jenderal (Itjen) BPK. Dengan demikian, metodologi yang diterapkan kini menyesuaikan konteks lokal kelembagaan, menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis persepsi yang dikalibrasi secara internal guna menjamin validitas dan reliabilitas hasil. Pergeseran ini sekaligus menegaskan kemandirian satuan kerja dalam mengukur dan mengevaluasi performa pelayanan publik melalui indikator numerik yang dapat ditindaklanjuti, serta memperkuat otonomi institusional dalam pengelolaan data perseptual secara terstandar dan akuntabel.

BAB II DESAIN KUESIONER DAN METODOLOGI SURVEI

A. Rancangan Desain Kuesioner

Desain kuesioner dalam SPKP dan SPAK dirancang dengan memedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan uraian sebagai berikut.

1. Peubah dan Referensi Waktu
Peubah dalam survei ini adalah persepsi layanan publik dan persespi anti korupsi. Referensi waktu (penilaian) yang diberikan responden atas dua peubah tersebut adalah saat responden selesai menerima layanan.
2. Persepsi Kualitas Pelayanan
Peubah persepsi kualitas layanan dipengaruhi oleh delapan variabel, yaitu
 - a. Informasi layanan;
 - b. Persyaratan layanan;
 - c. Prosedur layanan;
 - d. Jangka waktu layanan;
 - e. Tarif/biaya;
 - f. Sarana prasana layanan;
 - g. Profesionalisme petugas; serta
 - h. Layanan pengaduan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6, yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaaan antar skala (jarak) bermakna dan sama.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi kualitas pelayanan sebagai berikut:

No	Variabel	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1.	Informasi Layanan	Informasi atas layanan BPK tersedia melalui berbagai media elektronik dan nonelektronik antara lain <i>website</i> , telepon, <i>WhatsApp</i> , <i>live chat</i> , informasi langsung, kunjungan, dan sebagainya.	1 s.d. 6
2.	Persyaratan Layanan	Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang diinformasikan secara resmi.	1 s.d. 6
3.	Prosedur Pelayanan	Pegawai BPK melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang diinformasikan secara resmi.	1 s.d. 6
4.	Jangka waktu layanan	Pegawai BPK menyelesaikan layanan sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang diinformasikan secara resmi.	1 s.d. 6
5.	Tarif/ Biaya	Pegawai BPK tidak mengenakan tarif atau biaya atas pelayanan yang diberikan.	1 s.d. 6

No	Variabel	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
6.	Sarana prasarana	Pelayanan luring dan daring yang disediakan BPK memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.	1 s.d. 6
7.	Profesionalisme petugas	Pegawai BPK memberikan layanan luring dan daring secara profesional (responsif, ramah, mudah dikenali)	1 s.d. 6
8.	Sarana pengaduan	Saluran pengaduan atas layanan BPK mudah diakses (dalam bentuk <i>email</i> , <i>WhatsApp</i> , telepon, atau saluran lain)	1 s.d. 6
		Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan pengaduan atas layanan BPK, pegawai BPK merespon pengaduan Bapak/Ibu dengan cepat	1 s.d. 6

3. Persepsi Anti Korupsi

Peubah persepsi anti korupsi dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu

- a. Diskriminasi layanan;
- b. Pelayanan sesuai dengan prosedur;
- c. Penerimaan imbalan;
- d. Pungutan liar; serta
- e. Percaloan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6, yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaaan antar skala (jarak) bermakna dan sama.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi anti korupsi sebagai berikut.

No	Variabel	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
1.	Diskriminasi layanan	Pegawai BPK tidak melakukan diskriminasi terhadap permintaan layanan dari siapapun.	1 s.d. 6
2.	Pelayanan sesuai dengan prosedur	<i>(penilaian pada variable ini serupa dengan pertanyaan terkait variable prosedur layanan pada SPKP. Untuk menghindari duplikasi pertanyaan dan inkonsistensi jawaban, penilaian atas variable ini menggunakan jawaban responden atas variable prosedur layanan pada SPKP)</i>	1 s.d. 6
3.	Penerimaan imbalan;	Pegawai BPK tidak menerima imbalan uang, barang, dan atau fasilitas lainnya.	1 s.d. 6
4.	Pungutan liar; serta	Pegawai BPK tidak melakukan pungutan liar atau meminta uang, barang, dan fasilitas lainnya	1 s.d. 6
5.	Percaloan	BPK tidak mempraktikkan percaloan atau pihak perantara dalam pemberian layanan.	1 s.d. 6

B. Kriteria Responden

Kriteria responden survei yaitu:

1. Penerima layanan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada periode bulan Agustus 2025. Dalam hal ini responden telah menerima layanan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara secara tuntas.
2. Jenis layanan
 - a. **Layanan Pemeriksaan**, mencakup pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, penyerahan LHP, pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah, dengan inovasi berupa Aplikasi Tanjick Hukum yang salah satu fiturnya adalah Konsultasi Hukum Online, yang memudahkan pegawai dalam menanyakan terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adanya e-Book Buku Pintar Pemeriksaan LKPD dan Buku Pintar Usulan Status TLRHP BPK disusun sebagai media edukatif untuk meningkatkan pemahaman pemeriksa terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kerugian negara.
 - b. **Layanan Edukasi Pemeriksaan**, mencakup layanan prakerin, layanan perpustakaan, layanan informasi hukum berupa kumpulan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam <https://peraturan.bpk.go.id/>, tulisan hukum, catatan berita, dan infografis hukum dengan inovasi berupa Tanjick Hukum, yaitu Portal yang dikelola oleh Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang di dalamnya berisi Peraturan Daerah/Kepala Daerah, Kompilasi Pendapat Hukum, Konsultasi Hukum Online, Help Desk Gratifikasi, Kriteria Pemeriksaan, Legislasi Naskah Dinas, Catatan Berita dan Tulisan Hukum. Selain itu, terdapat pula fitur yang menampilkan *Employee of The Month* pada Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Aplikasi Tanjick Hukum memfasilitasi layanan, dokumentasi, dan edukasi hukum keuangan negara/daerah secara efisien, terakses, serta terklasifikasi bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Di samping itu, terdapat inovasi Tanjick Hukum Online, BedKo, PROPAGANDA (Pemahaman Risiko Hukum dalam Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah), BPKawan Sehati (Sehat, Sejahtera, dan Inklusif), Lomba Cerdas Cermat – Pengelolaan Keuangan Negara (LCC-PKN), Forum Kehumasan, BPK Kawan Muda (Maju Untuk Daerah), BPK Kawan Peduli Literasi, yang memperluas jangkauan media edukasi terkait pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara/daerah kepada masyarakat luas.
 - c. **Layanan Nonpemeriksaan**, mencakup layanan informasi publik, pengaduan masyarakat, Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, dengan inovasi berupa, SIPUTIK (Sistem Informasi Pelayanan Umum dan TI BPK Kaltara), SIJAGO (Sistem Informasi SPJ Go Online), SIPUSKA (Sistem Informasi, Belantara, Benuanta, *Modern Workplace*, e-CommStake, Buku Saku ZI, Buku Saku PPG, Buku Saku Layanan Publik, SIGARA, BPK Bersua, Desain Label Barang Milik Negara (BMN) dengan QR Code dan Label Warna, Sistem Informasi BPK Provinsi Kalimantan Utara (SIBTARA), Aplikasi e-Tamu, Pick Up Online Point, yang memperluas pelayanan publik pada umumnya dan menjangkau akses informasi kepada *stakeholder* eksternal.
3. Responden merupakan penerima setidaknya salah satu jenis layanan yang tersedia.

C. Pengumpulan Data

Survei SPKP dan SPAK dilakukan BPK secara berulang setiap bulan. Tipe pengumpulan data yang digunakan adalah *longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda dari waktu dan dilakukan terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi.

D. Metode Pencacahan

Metode pencacahan dalam penelitian ini adalah responden mengisi kuesioner secara mandiri (swacacah). Responden dapat mengisi survei secara mandiri melalui tautan yang dikirimkan melalui *Whatsapp/Email (Computer-Aided Web Interviewing)*.

E. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data hasil survei dilakukan melalui tahapan penyuntingan (editing) dan penyahihan (validasi).

a. Penyuntingan

Kegiatan penyuntingan dilakukan untuk mengecek adanya kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidaserasian informasi (*inconsistency*). Dalam tahapan ini dilakukan pula pengecekan atas kemungkinan adanya data dobel serta data tidak lengkap.

b. Penyahihan

Kegiatan penyahihan dilakukan untuk mengecek data dan proses proses perbaikan data yang salah menjadi data yang benar (valid), berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuntingan.

Dalam melakukan proses pengolahan data, tim pengolah data dapat melakukan konfirmasi kepada responden survei terkait atas jawaban responden yang dinilai tidak konsisten maupun anomali.

2. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai IPKP dan IPAK menggunakan statistik sederhana yaitu dengan merata-ratakan skor yang diberikan responden atas setiap pertanyaan survei.

F. Rekomendasi Survei

Pelaksanaan SPKP dan SPAK BPK telah mendapatkan rekomendasi **LAYAK** dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Nomor rekomendasi **V-23.0000.002** tanggal 8 Maret 2023.

BAB III HASIL SURVEI

A. Profil Responden

Para responden adalah penerima purna layanan publik BPK, yang berasal dari entitas pemeriksaan BPK baik para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara dan masyarakat pada umumnya, yang menerima layanan pada bulan Agustus 2025, yang berjumlah 78 orang. Hasil analisis statistik deskriptif untuk karakteristik responden disajikan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Karakteristik pertama dari responden yang dianalisis adalah perbandingan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Laki-laki	24	30,77
2.	Perempuan	54	69,23
Jumlah		78	100,00

2. Kelompok Usia Responden

Karakteristik kedua dari responden yang dianalisis adalah perbandingan jumlah responden berdasarkan usia yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Responden Menurut Usia

No.	Rentang Usia	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Kurang dari 25 tahun	36	46,15%
2.	25 s.d. 34 tahun	21	26,92%
3.	35 s.d. 44 tahun	13	16,67%
4.	45 s.d. 54 tahun	7	8,97%
5.	55 s.d. 64 tahun	1	1,28%
6.	Lebih dari 64 tahun	0	0,00%
Jumlah		78	100,00

3. Tingkat Pendidikan Responden

Karakteristik ketiga dari responden yang dianalisis adalah perbandingan jumlah responden berdasarkan pendidikan yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No.	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Setingkat SMA	9	11,54%
2.	Setingkat D3	0	0,00%
3.	Setingkat S1	65	83,33%
4.	Setingkat S2	0	0,00%
5.	Setingkat S3	0	0,00%
6.	Lainnya	0	0,00%
Jumlah		78	100,00

4. Pekerjaan Responden

Karakteristik keempat dari responden yang dianalisis adalah perbandingan jumlah responden berdasarkan pekerjaan yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Responden Menurut Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN)	20	25,64%
2.	Pelajar/Mahasiswa	29	37,18%
3.	Lainnya	29	37,18%
Jumlah		78	100,00

5. Jenis Layanan yang Diterima Responden

Karakteristik kelima dari responden yang dianalisis adalah perbandingan jumlah responden berdasarkan jenis layanan yang diterima yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut: (pada pertanyaan ini, responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Tabel 3.5
Responden Menurut Jenis Layanan yang Diterima

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1.	Pemeriksaan	12	15,38%
2.	Edukasi	34	43,59%
3.	Non Pemeriksaan	32	41,03%

B. Hasil Survei

1. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

Hasil survei dari 78 responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan atas layanan publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 3,56 dari skala 4,00 atau 88,94% yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

No.	Komponen Survei	Indeks
1.	Informasi atas layanan BPK tersedia melalui berbagai media elektronik dan non elektronik, antara lain <i>website</i> , telepon, <i>WhatsApp</i> , <i>live chat</i> , informasi langsung, kunjungan, dan sebagainya	3,44
2.	Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang diinformasikan secara resmi.	3,54
3.	Pegawai BPK melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang diinformasikan secara resmi.	3,57
4.	Pegawai BPK menyelesaikan layanan sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang diinformasikan secara resmi.	3,54
5.	Pegawai BPK tidak mengenakan tarif atau biaya atas pelayanan yang diberikan.	3,59
6.	Pelayanan luring dan daring yang disediakan BPK memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.	3,58
7.	Pegawai BPK memberikan layanan luring dan daring secara profesional (<i>responsif</i> , <i>ramah</i> , <i>mudah dikenali</i>).	3,63
8.	Saluran pengaduan atas layanan BPK mudah diakses (dalam bentuk <i>email</i> , <i>WhatsApp</i> , telepon, atau saluran lain).	3,56

No.	Komponen Survei	Indeks
9.	Pegawai BPK merespon pengaduan dengan cepat (jika pernah)	-
IPKP		3,56

2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Hasil survei dari 78 responden dapat disimpulkan bahwa tingkat persepsi anti korupsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 3,63 dari skala 4,00 atau 90,73% yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Komponen Survei	Indeks
1.	Pegawai BPK tidak melakukan diskriminasi terhadap permintaan layanan dari siapapun.	3,62
2.	Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur	3,59
3.	Pegawai BPK tidak menerima imbalan uang, barang, dan atau fasilitas lainnya.	3,66
4.	Pegawai BPK tidak melakukan pungutan liar atau meminta uang, barang, dan fasilitas lainnya.	3,64
5.	BPK tidak mempraktikkan percaloan atau pihak perantara dalam pemberian layanan.	3,64
IPAK		3,63

3. Masukan Reponden

Berdasarkan hasil SPKP dan SPAK, 50 dari 78 responden yang mengisi masukan menyatakan kepuasannya atas layanan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.8
Masukan Survei

No	Masukan
1	menurut saya sudah baik
2	sejauh ini tidak ada
3	Pelayanannya sangat bagus.semoga bisa bekerja sama dengan IAI muda
4	tidak
5	Jika boleh memberi masukan, semoga pelayanan yang sudah baik ini bisa terus dijaga bahkan ditingkatkan, khususnya dalam menyediakan sarana digital publik yang lebih interaktif
6	pelayanan BPK sudah sangat baik, saya sangat puas, sehingga tidak ada masukan tambahan saat ini.
7	Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi perihal BPK kepada masyarakat seluruh kaltara
8	Pelayanannya sudah baik, semoga bisa di pertahankan dan ditingkatkan lagi.
9	Sudah Cukup Baik
10	Ya
11	Mungkin sedikit masukan dari saya,,bisa di tambahkan WC umum di area luar dan ruangan khusus untuk perokok,,supaya asap ya Ndak sampai kemana mana.lain lain sdh bagus sekali
12	Semoga kedepannya edukasi terkait hal-hal yg perlu dipahami oleh masyarakat dan ASN dapat di perluas hingga ke pelosok dan perbatasan
13	Masukkan lebih ditingkatkan dan dipertahankan lagi apa yang sudah dicapai selama ini

No	Masukan
14	Secara keseluruhan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh BPK baik sekali
15	Pelayanan BPK lebih baik lagi
16	100 untuk BPK
17	Pelayanan yang baik terus dipertahankan
18	Semoga lebih baik
19	Puas
20	Tidak
21	BPK ramah dan melayani
22	Pelayanan BPK sangat baik
23	BPK perwakilan Kaltara harus bebas KKN dan transparan dalam memberikan pelayanan
24	Sdh cukup bagus, dan perlu ditingkatkan lagi
25	tidak
26	sangat baik dan ramah dan memuaskan
27	Semoga terus sukses melayani masyarakat
28	BPK dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan transparansi, respon terhadap pengaduan, sistem pelayanan online, kompetensi pegawai, dan kerja sama dengan stakeholder. Dengan demikian, BPK dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.
29	Tidak
30	Tidak ada
31	Bekerja lah lebih baik dari hari kemarin
32	Semoga lebih akurat dalam melayani masyarakat
33	Sudah cukup, tetap di pertahankan dan selalu di tingkatkan mutu pelayanannya
34	Cukup
35	Pelayanan yang di berikan oleh BPK sudah Sangat baik. khususnya dalam hal ketepatan waktu dan keramahan petugas. Semoga standar pelayanan ini dapat terus di pertahankan dan di tingkatkan.
36	Saya mendapatkan Pelayanan Prima saat berkunjung ke BPK Prov. KALTARA
37	Bisa ditingkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yg lebih baik dimasa depan
38	Perluasan area auditorium supaya muat banyak dan bisa untuk wedding skala besar
39	Tidak
40	Berantas korupsi sampai ke akar akarnya
41	Lebih mengenalkan pegawai BPK
42	Cukup
43	Semoga bisa melayani pembangunan zona integritas
44	Masukan untuk pelayanan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bisa mencakup beberapa area, termasuk peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPK.
45	Semoga terlaksanakan segera
46	Pelayanannya sudah baik, semoga bisa terus dipertahankan dan kalau bisa ditambah lagi inovasi-inovasi baru biar makin mudah diakses masyarakat.
47	mungkin ini masukan untuk meningkatkan pelayanan BPK yaitu peningkatan kualitas pelayanan
48	sangat baik dan ramah
49	Semoga BPK terus mempertahankan pelayanan yang baik dan lebih meningkatkan komunikasi agar semakin memuaskan masyarakat.

No	Masukan
50	Terkait pelayanan cukup responsif dan juga terpenuhi atas yang di butuhkan

Berdasarkan hasil SPKP dan SPAK, 78 responden yang mengisi jawaban terkait kelayakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan predikat Zona Intergitas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menyatakan kepuasannya atas layanan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.9
Jawaban Survei Kelayakan

No	Jawaban
1	Ya, karena BPK kaltara konsisten banget dalam menjaga integritas dan pelayanan, sistem kerjanya baik, bisa dipertanggungjawabkan, dan jauh dari praktik korupsi.”
2	Iya, saya berpendapat bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) karena telah menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan integritas kelembagaan. Hal ini tercermin dari kinerja pengawasan keuangan yang akuntabel, inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, serta transparansi dan pelibatan publik dalam berbagai kegiatan. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa BPK Kalimantan Utara telah memenuhi indikator utama pembangunan Zona Integritas menuju WBBM secara substansial dan berkelanjutan.
3	Ya
4	Menurut saya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui berbagai inovasi pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja. Dengan melihat capaian tersebut, saya menilai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI). Namun demikian, tentunya predikat tersebut tetap perlu disertai dengan evaluasi berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat.
5	Ya
6	Ya, menurut saya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini terlihat dari komitmen nyata dalam menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas layanan kepada publik, serta upaya berkelanjutan dalam membangun zona integritas yang bebas dari korupsi
7	Sangat layak
8	Menurut saya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat WBBM karena sudah menunjukkan komitmen dalam membangun integritas, memberikan pelayanan yang transparan dan cepat, serta terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9	ya
10	Ya
11	Ya, menurut saya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini tercermin dari sikap profesionalisme, transparansi, serta keramah-tamahan seluruh personel BPK yang saya temui. Dalam kegiatan bersama BPK, setiap alur komunikasi berjalan rapi dan responsif, serta tidak ada praktik yang mengindikasikan penyalahgunaan wewenang.

No	Jawaban
12	ya, karena BPK Perwakilan Provinsi Kaltara telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan profesional. Pelayanan publik yang diberikan juga cukup responsif dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Selain itu, integritas pegawai yang tinggi dan upaya berkelanjutan dalam inovasi menjadi nilai tambah yang mendukung kelayakan predikat tersebut.
13	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dinilai berpotensi meraih predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam upaya Pembangunan Zona Integritas (ZI). Hal ini mencerminkan komitmen yang konsisten dari BPK Kalimantan Utara dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memperkuat integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
14	ya, layak. karena pelayanan yang diberikan oleh pihak BPK sangat baik, selain itu arahan juga diberikan dengan jelas sehingga minim misskomunikasi ketika acara berlangsung
15	ya
16	Menurut saya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) karena mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Fasilitas yang tersedia tertata dengan baik dan mendukung kenyamanan penerima layanan, sementara pegawai selalu bersikap ramah, profesional, dan siap membantu, sehingga menciptakan pengalaman pelayanan yang positif dan memuaskan.
17	-
18	Ya
19	Ya, BPK Perwakilan Kalimantan Utara layak menuju WBBM karena telah menunjukkan integritas, pelayanan prima, dan komitmen terhadap reformasi birokrasi.
20	Ya, karena sudah baik dalam pelayanannya.
21	Ya, sebab pelayanan diberikan oleh staf BPK kaltara adalah pelayanan yg terbaik seperti menyediakan peralatan yg diperlukan dan menerima setiap aduan dengan baik, senyum dan ramah
22	Ya, perwakilan BPK kalimantan utara layak mendapatkan predikat menuju WBBM karena telah menunjukkan komitmen nyata pegawai dalam memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, tidak melakukan pungutan liar atau menerima imbalan dalam bentuk apapun, serta nelaksanakam prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang di informasikan secara resmi.
23	Ya, karena selama ini pelayanan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sudah baik, transparan, dan pegawainya melayani dengan ramah serta profesional.
24	Ya
25	Ya
26	Ya. Layak
27	Ya
28	Ya, pelayanan bagus
29	Ya
30	Ya, Karena Pelayanan nya yg sangat ramah dan sistem keamanan gedung yg luar biasa.
31	Ya,,karena sudah memenuhi standar pelayanan yang baik
32	Ya, Saya mendapatkan pengaman yang baik selama di Kantor BPK Provinsi Kalimantan Utara
33	Ya dapat dilihat dari kinerja BPK provinsi kalimantan utara yang benar2 konsisten serta petugasnya menjalankan tugasnya yan amanah
34	Ya Layak karena kinerjanya sangat bagus

No	Jawaban
35	Layak, karena BPK memberikan layanan prima yang luar biasa. Fasilitas dan pelayanan dari BPK yang disediakan sangat bagus sekali. Bahkan menurut saya paling baik di Tarakan
36	Ya
37	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (BPK Kaltara) menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI). Beberapa indikator yang mendukung penilaian ini adalah
38	iya layak, karena Pelayanan yang luar biasa dalam sambutan.. ke tamu.. dari segi keamanan dan kebersihanya.. yang kompak dan gercep
39	Yah. Karena BPK Perwakilan Provinsi Kaltara telah melakukan pelayanan yang maksimal sesuai ketentuan.
40	Iya
41	Setuju
42	Ya
43	Ya, BPK perwakilan prov. Kaltara layak mendapatkan predikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani pembangunan zona integritas
44	Ya karena pelayanan yang di lakukan dengan baik dan sesuai visi dan misi BPK
45	Ya, karena BPK Perwakilan KALTARA transparan dalam memberikan pelayanan.
46	Ya, karena memang layak
47	ya karena gedungnya multifungsi bisa dilakukan bnyk kegiatan yg positif
48	Ya
49	ya sangat memuaskan
50	YA. LAYAK.
51	Ya
52	Ya. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan kinerja yang baik dalam membangun Zona Integritas dan layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan prestasi dan kinerja yang telah dicapai, termasuk meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2021.
53	Ya
54	Sangat setuju
55	Ya, karena bekerja sesuai dengan SOP
56	Ya
57	Ya, karena kota tarakan menuju smart city
58	Ya, karena sudah saatnya menjadi lebih maju dan terus berkembang
59	Iyaa..
60	Ya. Saya menilai Bpk perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat menuju Wilayah Birokrasi
61	Ya, Layak
62	Ya.. termasuk birokrasi yang layak mendapatkan predikat cukup baik
63	Ya , fasilitasnya bagus baru mewah , belum ada di tempat lain
64	Ya
65	Sangat layak
66	Ya, menurut saya layak, berdasarkan pengalaman saya saat berkunjung untuk mengikuti seminar. Saya merasakan suasana yang nyaman, lingkungan yang bersih, dan pelayanan yang ramah. Walaupun saya belum pernah berurusan langsung dengan

No	Jawaban
	pelayanan BPK secara resmi, dari sisi pelayanan yang saya alami, BPK sudah menunjukkan sikap melayani dengan baik.
67	Ya, layak karena telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
68	Ya/supaya semakin sadar dan pentingnya menegakkan kejujuran
69	Iya
70	Ya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berpotensi layak mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pembangunan Zona Integritas (ZI), namun perlu ada evaluasi lebih lanjut. Pencapaian WBBM memerlukan pemenuhan kriteria yang ketat terkait reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas, dan pencegahan korupsi. BPK Perwakilan Kalimantan Utara telah menunjukkan upaya ke arah tersebut, namun perlu dipastikan apakah upaya tersebut telah memenuhi seluruh standar yang ditetapkan untuk meraih predikat WBBM.
71	Ya karena dengan adanya BPK sangat membantu masyarakat di Kalimantan Utara
72	Ya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) karena telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan Zona Integritas secara konsisten dan berkelanjutan.
73	layak karena BPK telah melakukan pelayanan dengan baik
75	Ya, menurut saya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju WBBM. Soalnya selama ini pelayanan yang diberikan sudah baik, transparan, dan selalu berusaha membantu masyarakat dengan cepat. Selain itu pegawainya juga ramah dan responsif, jadi menurut saya memang pantas untuk mendapatkan predikat tersebut.
76	Untuk menentukan apakah apakah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara layak mendapatkan predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pembangunan Zona Integritas (ZI), perlu dilakukan evaluasi berdasarkan bbrapa aspek yg telah di tetapkan yaitu manajemen perubahan, manajemen SDM, akuntabilitas dan pengawasan
77	Ya, karena BPK sangat aman ramah dan juga pelayanannya sangat bagus
78	Ya, karena BPK selalu membeikan pelayanan dengan baik, ramah, dan transparan sehingga layak mendapatkan predikat tersebut.

BAB IV

EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Evaluasi atas Hasil Survei

Berdasarkan masukan atas hasil survei tersebut di atas, maka hal-hal yang menjadi bahan evaluasi antara lain:

1. Berdasarkan determinasi responden, maka sebagian besar didominasi oleh Layanan Edukasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (BPK Kaltara) dan layanan Tanjik Hukum Online. Adapun hasil SPKP menunjukkan tingkat kepuasan atas layanan publik sebesar 88,94%, sedangkan hasil SPAK menunjukkan tingkat persepsi anti korupsi sebesar 90,73%.
2. Berdasarkan tanggapan responden, mayoritas menilai pelayanan BPK Kaltara telah berjalan dengan baik dan memuaskan, bahkan memperoleh apresiasi atas keramahan petugas, ketepatan waktu, serta kualitas layanan yang dinilai prima. Namun demikian, masih terdapat harapan agar pelayanan publik terus ditingkatkan melalui inovasi digital yang lebih interaktif, peningkatan transparansi, serta sosialisasi hukum hingga menjangkau pelosok dan perbatasan.
3. Dari hasil evaluasi, responden juga menekankan pentingnya penguatan sarana pendukung pelayanan, seperti ruang publik yang lebih representatif, fasilitas umum yang memadai, serta area edukasi yang dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang peran BPK. Masukan ini memperlihatkan bahwa ekspektasi masyarakat tidak hanya terkait substansi pelayanan, tetapi juga kualitas lingkungan layanan yang mendukung kenyamanan dan aksesibilitas publik.
4. Selain itu, terdapat dorongan untuk memperkuat integritas kelembagaan dengan menjaga independensi, menolak praktik KKN, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses pemeriksaan. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap BPK Kaltara sangat bergantung pada profesionalisme, keterbukaan informasi, serta konsistensi dalam melaksanakan nilai-nilai antikorupsi.

B. Tindak Lanjut atas Hasil Survei

Atas evaluasi atas hasil survei tersebut di atas, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. BPK Kaltara akan mengampanyekan pemanfaatan teknologi informasi yang telah diintegrasikan melalui pengembangan aplikasi Belantara sehingga layanan publik menjadi yang lebih cepat, transparan, dan responsif, serta masyarakat dapat mengakses terhadap informasi hukum keuangan negara dapat dilakukan secara lebih mudah dan efisien.
2. Sebagai upaya menjaga konsistensi mutu layanan, BPK Kaltara berkomitmen memperkuat kapasitas pemeriksa melalui program diklat berkelanjutan, publikasi edukatif, dan sosialisasi hukum keuangan negara yang menjangkau hingga wilayah terpencil. Dengan demikian, pemerataan pemahaman publik terhadap peran dan fungsi BPK dapat tercapai secara lebih merata.
3. Untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, BPK Kaltara akan menegakkan prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dengan meningkatkan transparansi proses pemeriksaan serta memperluas ruang partisipasi publik. Sebagai bagian dari strategi ini, publikasi hasil survei dan inovasi layanan akan terus diperkuat melalui berbagai kanal komunikasi digital maupun tatap muka..
4. Sebagai tindak lanjut atas dominasi layanan edukasi dan Tanjik Hukum Online dalam survei, BPK Kaltara akan memperkuat percepatan layanan teknis, memperluas sosialisasi publik hingga wilayah terpencil dan perbatasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang interaktif. Selain itu, peningkatan transparansi, penyediaan sarana layanan yang lebih representatif, dan penguatan edukasi antikorupsi akan terus dikembangkan agar

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan harapan pemangku kepentingan.

5. Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan serta persepsi antikorupsi yang telah mencapai lebih dari 88%, BPK Kaltara berkomitmen memperkuat sinergi lintas unit, menyederhanakan manajemen pengetahuan, meminimalisasi perangkapan tugas, serta terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui publikasi rutin dan optimalisasi media digital dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Salah satu program strategis untuk mengoptimalkan kegiatan dimaksud dapat diusulkan Forum Kehumasan, Media Gathering, serta Talk Show di RRI.

BAB V

PENUTUP

Meskipun capaian Indeks SPKP dan SPAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara masing-masing berada pada kisaran 88,94% dan 90,73% yang mencerminkan apresiasi publik terhadap profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan, dengan menjadikan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai pijakan strategis dalam peningkatan kualitas layanan. Meskipun mayoritas responden menyatakan pelayanan sudah sangat baik, tetap diperlukan penguatan aspek transparansi, kecepatan respon, perluasan sosialisasi ke pelosok daerah, serta penyediaan sarana pendukung yang lebih ramah publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kembali strategi peningkatan layanan dan promosi yang lebih adaptif, kolaboratif, serta berbasis data.

Sejalan dengan itu, berbagai inovasi yang telah dikembangkan, seperti Tanjik Hukum Online, Belantara, BedKo, Benuanta, e-CommStake, SIGARA, SIBTARA, serta penerapan *Modern Workplace*, akan terus dimanfaatkan dan dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara interaktif, efektif, dan adaptif. Inovasi berbasis teknologi ini bukan hanya instrumen pelayanan, tetapi juga wujud nyata komitmen BPK Kaltara dalam memperkuat literasi hukum keuangan negara, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong pengawasan yang lebih inklusif.

Dengan dukungan penuh para pemangku kepentingan dan penguatan budaya kerja antikorupsi, BPK Kaltara berkomitmen menjaga profesionalisme, integritas, serta kualitas layanan publik yang prima. Upaya berkelanjutan ini diyakini akan memperkuat legitimasi BPK sebagai lembaga pemeriksa yang transparan, akuntabel, dan terpercaya dalam mewujudkan predikat WBBM serta meningkatkan kepercayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagai bentuk akuntabilitas, monitoring kinerja akan dilakukan berbasis indikator terukur dan berbasis umpan balik masyarakat secara berkelanjutan. Dukungan dari para stakeholder, termasuk Tim Penilai Internal (TPI), menjadi elemen penting dalam memperkuat komitmen birokrasi bersih, responsif, dan melayani. Dengan demikian, BPK Kaltara tetap konsisten dalam memperjuangkan predikat WBBM sebagai refleksi nyata pelayanan publik yang berintegritas dan terpercaya.

LAMPIRAN

A. Lampiran I – Data Responden Survei

No	Nama	Nomor HP
1	Annida Zakkiah Az-Zahra	081253418793
2	Muhammad Muaz Ihsan	081350933205
3	Hamnah Al Muti'ah	089531759322
4	Nabilah Febriyanti	081254539175
5	Nurul Syahirah	085346361359
6	Auliya'i Shifa'a	085704180849
7	Muhammad Iqbal	082256172093
8	Nadila Hasbi Ananta	081257220188
9	Aulia Amanda	081253853929
10	Rabiatul Isnaeni	082213505298
11	Oriza Sativa	082351436105
12	Andi Rosita	087770656838
13	Adelia Putri	081521527012
14	Michelle	085705221891
15	Suhendra Safrin	081318828073
16	Nova Fitriana	082354821300
17	Nurtang Marlianti	089527873411
18	Dina Arafa	082149821489
19	Olyvia Ananda	082157168482
20	Nourma Revania Zahra	081258083265
21	Muhammad Ariandy Fahreza	081242124401
22	Lisdawati	082159817262
23	Mahesa Sukmawati	089508534951
24	An Nissa Fitria	082281434418
25	Norahmizah	0148269019
26	Muhammad Iqbal Fahlevi	085200486444
27	Hamidah	082251099534
28	Fitria Rizkina	082261687288
29	Harina	082244908548
30	Dwi Ratmono S,IP	085247228507
31	Hasnah	085220678995
32	Angel Justin Timothy	085387753400
33	Ratnawati	082289863400
34	Rifki Maulana	089637687682
35	Dewi Miryanthi	085234004589
36	Emilailan	081347339778
37	Isnaini	085347019646
38	Zainal Abidin	081357673507
39	Irawati	081253033447
40	Ayu Noviyanti	081250602464
41	Yunus	082344986495
42	Yuni Winarsih	081349744774
43	Muhammad Haidir	082155067844

No	Nama	Nomor HP
44	Muhamad Safii	082146302236
45	Kumaidi Harianto	08125470265
46	Ani Sulastri	08115423888
47	Hasrifah Arbat Ariani	081253703988
48	Indra Wijaya	085389314313
49	Dorce Kilam Imut	081345914829
50	Clara Sri Fajarianti	082134448602
51	Pasrah	081294945032
52	Regita Fatikah Sari	081351122349
53	Jubaidah	081327831351
54	Junedi	082159818376
55	Muhammad Risal	085236922244
56	Melsa	082351971438
57	Diana Lukitasari	082176123583
58	Ahmad Fahmur Riza	085236225631
59	Tinus Ingan	082254746662
60	Koni Aspiani	082271060873
61	A.Muh.Saifullab	081254171696
62	Askar Rangga Y	081254510471
63	Putra	085161959455
64	Anastasia Johanes	082353139918
65	Esra Pagewang	085179820877
66	Benedikta Generen Sogen	085246588657
67	Oqueen Veronica Rorong	082351773698
68	Mailinda Kayang	085346888789
69	Linda Lestari	082279985879
70	Lisa Haryati	081348414929
71	Winda Agustina	082244117867
72	Herny Wahyuni	082255738360
73	Hairul	0895325836941
74	Dewi Jelista	082149639058
75	Chesyah Dwi Aqifah	085325534236
76	Agustia	089677096220
77	Salbina Lipat Rebong	082154187671
78	Muh. Nur Arisan	082154425351

B. Lampiran II – Tangkapan Layar Tampilan Survei

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

BIDANG PEMERIKSA KELUARGA PERAWALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
Tahun 2024

TENTANG SURVEI SPKP DAN SPAK

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini dilakukan secara mandiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pembangunan Zona Integritas. Tujuan survei adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan menjajalakan pemerintah yang bersih dan akuntabel di BPK.

Bapak dan Ibu terpilih menjadi responden SPKP dan SPAK BPK karena Bapak dan Ibu telah menerima pelayanan dari **BPK Perwakilan Kalimantan Timur**.

Partisipasi Bapak/Ibu dalam dalam survei ini bersifat sukarela dan pengisian jawaban survei merupakan bukti kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi.

Survei ini menyajikan pemersip, pendapat, dan atau pengalaman Bapak dan Ibu ketika menerima layanan dari BPK.

Kami mohon agar survei ini dapat dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setiap jawaban survei menjadi informasi yang berharga bagi BPK sebagai alat evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Informasi yang diperoleh dari seluruh responden survei ini akan diolah menjadi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kami akan menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu.

Isian

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

* Required

INFORMASI UMUM

1. Nama Responden *

Enter your answer

2. Nomor Telepon

Enter your answer

3. Jenis Kelamin *

Pria

Wanita

4. Umur *

Kurang dari 25 tahun

C. Lampiran III – Tangkapan Layar Pengiriman Survei kepada Responden

